

## ABSTRAK

Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak semuanya bisa lahir dengan fisik dan hormon yang sempurna. Salah satu masalah yang biasa terjadi yaitu adanya kelainan kelamin pada anak yang lahir sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin seorang anak. Pada anak yang masih kecil mungkin belum terjadi masalah psikososial, tetapi pada anak yang lebih besar dapat terjadi suatu krisis identitas. Upaya medis untuk menyesuaikan atau memperbaiki bentuk alat kelamin diikuti dengan upaya hukum untuk perubahan data identitas diri yaitu seperti perubahan identitas pada nama dan jenis kelaminnya. Dari kejadian ini maka akan muncullah istilah transgender.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akibat Hukum Dari Perubahan Identitas Jenis Kelamin Terhadap Seorang Transgender Dalam Perspektif Hukum Perdata”? Tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang Menyatakan Diterima Permohonan dalam Perubahan Identitas Jenis Kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN.Bks dan untuk Menganalisis Akibat Hukum dari Perubahan Identitas Jenis Kelamin Terhadap Seseorang dalam Perspektif Hukum Perdata.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder, dan tersier. Ruang lingkup dari penelitian normatif dalam skripsi ini adalah dengan mempelajari dan menelaah Penetapan Nomor : 56/PDT.P/2021/PN.BKS berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Berdasarkan hasil analisis Penetapan Nomor : 56/PDT.P/2021/PN.BKS, dalam penutup dapat ditarik kesimpulan Pertimbangan hakim di dalam Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PN.BKS dalam penentuan jenis kelamin, menyatakan bahwa “Memperhatikan Undang-Undang No.23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum perdata lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini”. dalam pertimbangan hukumnya hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

***Kata Kunci: Perubahan Identitas Jenis Kelamin, Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hukum***

## **ABSTRACT**

Not all children born into this world can be born with perfect physique and hormones. One of the problems that usually occurs is the presence of sexual abnormalities in children born, causing difficulties in determining the sex of a child. In young children there may not be psychosocial problems, but in older children an identity crisis may occur. Medical efforts to adjust or improve the shape of the genitals are followed by legal efforts to change personal identity data, such as changing the identity of the name and gender.

The formulation of the problem proposed in this study is "What are the legal consequences of changing gender identity on a transgender person in the perspective of civil law"? The purpose of this study was to analyze the legal considerations of the district court which declared that the application for a change in gender identity was in the determination of the Bekasi City District Court Number: 56/Pdt.P/2021/PN.Bks and to analyze the legal consequences of changing gender identity on a person. in Civil Law Perspective.

The method used by the author in this research is using normative legal research methods, namely a legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials or primary, secondary, and tertiary data. The scope of the normative research in this thesis is to study and examine Determination Number: 56/PDT.P/2021/PN.BKS based on statutory regulations, legal theories, and the opinions of legal scholars. Based on the results of the analysis of Determination Number: 56/PDT.P/2021/PN.BKS, in closing it can be concluded that the judge's considerations in Decision No. 56/Pdt.P/2021/PN.BKS in determining gender, stated that "Considering Law No.23 of 2013 concerning Population Administration Jo. Article 97 paragraph (2) of Presidential Regulation No. 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, as well as other civil law provisions related to this case". In his legal considerations, the judge has carried out his obligation to explore, follow and understand the values of law and justice that live in society. This is in accordance with article 50 and article 5 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power.

***Keywords : Gender Identity Change, District Court, Legal considerations***